



Media Title	Kontan	
Date	15 September 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	20	Article Size
Journalist	Agus Triyono	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

Hutama Karya Dapat Tol Trans Sumatra 40 Tahun

PT Hutama Karya bisa bekerjasama dengan pihak lain dalam pembangunan proyek tol ini

Agus Triyono, Asep Munazat, Fahriyadi

JAKARTA. Pemerintah akan memberikan hak pengusahaan atau konsesi jalan tol Trans Sumatra selama 40 tahun kepada PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek. Aturan main ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatra.

Calon beleid ini menyatakan, hak konsesi yang melekat pada badan usaha milik negara (BUMN) karya tersebut adalah dalam rangka melaksanakan penugasan pemerintah untuk membangun empat ruas jalan bebas hambatan di pulau berjulukan Andalas itu. Keempat ruas tol itu: Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Kandis-Dumai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Total panjangnya mencapai 322,98 kilometer.

Selain itu, Hutama Karya juga mendapatkan beberapa kemudahan untuk membangun megaprojek dengan total nilai Rp 39,33 triliun tersebut. Yakni, bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk membangun tol Trans Sumatra melalui pembentukan anak perusahaan.

Meskipun boleh membentuk anak perusahaan, Hutama Karya harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas. "Dalam perpres ini juga dikatakan, setelah jalan tol selesai dibangun, Hutama Karya juga bisa mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sa-

ham mereka kepada mitra kerjasama atau pihak lain," kata Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), akhir pekan lalu.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sudah menekan draft final Perpres Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatra pada Kamis (11/9) pekan lalu. Kalau tak ada aral melintang, perpres ini bakal terbit bulan depan. "Hutama Karya akan diprioritaskan untuk membangun dua ruas dari empat ruas, yakni Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya, dengan pertimbangan lahan yang sudah siap ketimbang dua ruas lain-

nya," ujar Djoko.

Di ruas Medan-Binjai, sekitar 70% tanah yang akan dilewati tol ini adalah milik PT Perkebunan Nusantara II sehingga lebih muda. Sedang, Palembang-Indralaya masih dilakukan pembebasan lahan dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat.

Skema pendanaan

Menurut I Gusti Ngurah Putra, Direktur Utama Hutama Karya, perusahaannya akan segera merespon penugasan sebagai pelaksana proyek Tol Trans Sumatra. "Kami akan segera menggelar rapat mengenai penugasan ini," katanya yang belum membaca

draft final perpres itu.

Salah satu yang akan segera Hutama Karya siapkan adalah soal pendanaan. Untuk membangun Tol Trans Sumatra, berdasarkan hitungan pemerintah, butuh dana puluhan triliunan rupiah (*lihat tabel*). Dan, perusahaan pelat merah itu boleh mencari pembiayaan dengan beragam skema. Misalnya, pinjaman dari badan

investasi pemerintah dan lembaga keuangan lokal.

Dengan banyaknya opsi yang diberikan pemerintah itu, tentu akan memudahkan Hutama Karya dalam mencari dana proyek tol Trans Sumatra. Tapi, Gusti akan menghitung untung dan rugi dari setiap skema. "Opsinya yang paling menguntungkan yang akan kami pilih," ujar Gusti. ■

Tol yang Membentang di Sumatra

Ruas	Panjang (km)	Investasi (Rp miliar)	Biaya Tanah (Rp miliar)
Medan-Binjai	15,8	2.289	116
Palembang-Indralaya	22,0	2.313	156
Pekanbaru-Kandis-Dumai	135,0	17.347	974
Bakauheni-Terbanggi Besar	150,0	17.389	1.033

Sumber: Badan Pengatur Jalan Tol

Aturan Main Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Pulau Andalas

Pasal 4 1. PT Hutama Karya dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatra bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan.

2. Dalam pembentukan anak perusahaan, PT Hutama Karya bertindak sebagai pemegang saham mayoritas.

3. Setelah jalan tol selesai dibangun, PT Hutama Karya bisa mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham kepada mitra kerjasama atau pihak lain.

Pasal 5 Pendanaan PT Hutama Karya dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Trans Sumatra berasal dari :

- Penyertaan modal negara.
- Penerusan pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri.
- Penerbitan obligasi PT Hutama Karya.
- Pinjaman PT Hutama Karya dari lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan multilateral.
- Pinjaman atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah.
- Pendanaan lain yang sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 6 Dalam penerbitan obligasi, PT Hutama Karya bisa diberikan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran.

Pasal 7 Untuk pinjaman dapat diberikan insentif, baik dalam bentuk masa tenggang pengembalian dan tingkat suku bunga.

Pasal 8 Dalam pelaksanaan penugasan PT Hutama Karya, menteri BUMN melaksanakan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan, serta mengkoordinasikan BUMN lain untuk mendukung pelaksanaan penugasan ini.

Pasal 9 Dalam melaksanakan penugasan kepada PT Hutama Karya, menteri pekerjaan umum harus melakukan:

- Menetapkan standar kinerja pelayanan yang dituangkan dalam perjanjian penugasan jalan tol.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap teknis pembangunan dan pengoperasian jalan tol.

c. Memberikan hak pengusahaan jalan tol kepada PT Hutama Karya selama 40 tahun.

Pasal 10 Dalam mendukung kelanjutan proyek pembangunan Trans Sumatra, selain empat ruas yang telah ditetapkan, menteri pekerjaan umum akan menetapkan ruas jalan tol lainnya di Sumatra.

Pasal 11 1. Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan empat ruas jalan tol Trans Sumatra oleh PT Hutama Karya dengan kewenangan masing-masing.

2. Dukungan ini dituangkan dalam *service level agreement* (SLA) antara PT Hutama Karya dengan menteri, kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota.

Pasal 12 PT Hutama Karya dalam rangka menjalankan penugasan, menyampaikan laporan kepada menteri pekerjaan umum, menteri keuangan, dan menteri BUMN setiap enam bulan.

Sumber: Rancangan Perpres Tol Trans Sumatra